

BAB IV

KEHIDUPAN MENEGARA MENURUT DRIYARKARA

4.1 Pengertian Negara

4.1.1 Negara

Negara merupakan suatu tatanan masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh berbagai asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.¹⁰⁶

Dengan kata lain, negara adalah organisasi masyarakat yang di dalamnya terdiri atas individu-individu yang membentuk kelompok berdaulat, dengan pembagian tugas masing-masing demi mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan umum. Pembagian kekuasaan kepada setiap alat-alat negara sebagai fungsi kontrol sehingga setiap fungsi dilaksanakan secara tepat dan menghindari penggunaan sewenang-wenang kekuasaan yang digenggamnya. Sebagai negara yang berbentuk republik (demokratis), Negara Indonesia menganut sistem *trias*

¹⁰⁶ Mikot Fios Yohanes, *Konsep Ekasila Menurut Driyarkara*, (Skripsi), (Kupang: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, 2016), hlm. 54-55.

politika yang diajarkan oleh Montesquieu yang terdiri atas tiga kekuasaan yakni kekuasaan legislatif (kekuasaan perundang-undang); kekuasaan eksekutif (kekuasaan pemerintahan atau yang menjalankan undang-undang); dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman). Ketiganya bekerja sama tetapi dalam koridornya masing-masing demi kebaikan hidup komunal.¹⁰⁷

4.1.2 Negara Menurut Driyarkara

Bagi Driyarkara negara merupakan wadah bagi aktivitas kehidupan bersama.¹⁰⁸ Negara adalah kehidupan, sebagai aksi, gerak. Manusia tidaklah bernegara melainkan *me-negara*. Me-negara yang artinya manusia melibatkan diri secara total dalam kehidupan melalui perbuatan-perbuatan riilnya. Negara ada karena manusia me-negara.¹⁰⁹ Pertanyaannya, negara adalah satu wujud dari ada bersama, apa yang hendak dicapai dari keberadaan manusia tersebut? Menurut Driyarkara, yang perlu disadari oleh setiap manusia yang ada dalam negara ialah bahwa negara adalah kita, negara bukanlah aku. Dalam arti, negara menyangkut kebersamaan manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, bukan aku yang menegara melainkan kita yang menegara dan penegaraan kita itulah Negara!¹¹⁰ Manusia menyulut aksi bersama dan melahirkan kesatuan. Kesatuan tidak dapat dipisahkan dari tindakan konkret manusia. Driyarkara mengatakan kesatuan itu adalah kesatuan dalam dan karena berbuat.¹¹¹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Driyarkara, *Driyarkara Tentang Negara Dan Bangsa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 9.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹¹ *Ibid.*

Setiap perbuatan manusia mengandung nilai yakni nilai manusia yang tidak terdisintegrasi dari tindakan komunal. Tindakan komunal tersebut sebagai gambaran kesatuan. Kesatuan memungkinkan terwujudnya nilai manusia.¹¹² Tanpa kesatuan atau tiadanya yang lain dalam kehidupan bersama menihilkan makna tiap perbuatan manusia. Perbuatan manusia selalu memiliki tujuannya. Selain tertuju kepada diri sendiri juga mengarah kepada pribadi lain sebagai suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dari pengertian negara menurut Driyarkara ini mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, negara berhubungan dengan kompleks perbuatan-perbuatan bersama. Negara pertama-tama adalah sebuah tindakan bersama. Dan oleh karena itu, istilah yang paling tepat untuk menggambarkan tindakan bersama bukanlah negara, melainkan menegara. Dalam tindakan menegara, manusia mengejar tujuan atau cita-cita bersama, yakni kesejahteraan dan ketertiban umum. *Kedua*, pelaku kompleks perbuatan-perbuatan itu adalah banyak manusia. Menegara tidak bisa hanya dilakukan oleh satu individu tertentu saja. Menegara mesti melibatkan semua manusia yang ada dan hidup dalam negara tersebut. Oleh karena itu, pemusatan kekuasaan negara hanya pada satu individu atau kelompok tertentu sebagaimana tampak dalam rezim otoritarianisme dan despotisme dipastikan bukanlah aktivitas menegara. *Ketiga*, banyak manusia melakukan kompleks perbuatan-perbuatan itu secara terus menerus. Selama perbuatan-perbuatan

¹¹² *Ibid.*

bersama dilakukan oleh banyak manusia, menegara tak pernah selesai karena proses penegaraan akan terus berlanjut.¹¹³

4.2 Kehidupan Menegara

4.2.1 Percakapan

Penegaraan adalah percakapan antar manusia. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa setiap warga negara bercakap-cakap dengan setiap warga negara. Namun, dengan kesanggupannya bersama untuk hidup bersama, untuk memikul beban bersama, untuk melakukan wajib bersama, untuk bersama memperjuangkan hidup dan nasibnya, dengan kesemuanya ini kita bercakap-cakap bersama dan percakapan itu masih juga dilangsungkan dalam badan-badan perwakilan yang terus ada sebab percakapan tidak akan habis.¹¹⁴

Dengan dan dalam percakapan, dua manusia menjadi satu. Demikian juga dengan dan dalam menegara, banyak manusia menjadi satu. Dalam dan dengan percakapan yang satu memberi pada yang lain, dan pada hakekatnya memberi berarti memberikan diri. Demikian juga yang terjadi dalam dan dengan penegaraan. Di sini pun manusia memberikan dirinya sendiri. Dalam masa perang, ini bisa berarti memberikan hidupnya.

Menegara berarti bercakap-cakap. Dengan siapa kita bercakap-cakap? Tidak hanya dengan sesama manusia, melainkan juga dengan alam. Dengan alam, sebab hidup manusia itu berupa pergulatan dengan alam. Pergulatan untuk

¹¹³ Silvano Keo Bhaghi, *Op. Cit.*, hlm.155-156.

¹¹⁴ Driyarkara, *Sosialitas Sebagai Eksistensial*, *Op. Cit.*, hlm 609.

menaklukkan alam, supaya alam menjadi alat manusia. Percakapan itu kita lakukan bersama. Dengan demikian, terjadi produksi mulai dengan cara-cara yang sangat sederhana sampai ke cara-cara yang sangat canggih dalam zaman teknik modern ini.¹¹⁵

Percakapan itu mempersatukan. Demikian juga percakapan kita dengan dunia jasmani. Dunia jasmani menjadi satu dengan kita dalam bentuk-bentuk rumah, pakaian, makanan, alat-alat teknik, alat-alat kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dalam percakapan kita bersama dengan dunia jasmani serta antara kita dan kita, kita menjunjung dunia jasmani sehingga dunia itu mengalami kesatuannya dengan manusia.¹¹⁶

Untuk mengerti kehidupan negara, pandangan kita harus dinamis. Negara jangan dipandang sebagai batu yang tetap tidak berubah (itu pandangan statis). Negara adalah kehidupan jadi aksi, gerak, maka kesampingkan istilah-istilah seperti: bernegara, mempunyai negara. Jika tidak kesampingkan kita membayangkan seolah-olah negara itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri di luar perbuatan manusia. Sebagai manusia yang hidup bersama-sama atau sebagai warga negara, yang perlu diketahui bersama-sama bahwa manusia itu tidak bernegara, melainkan menegara! Ia menegarakan diri sendiri, sesama manusia, dan tanahnya dengan seluruh keadaannya.¹¹⁷ Untuk memperjelas maksud, ia menggunakan istilah menegara. Sama seperti sebuah nyanyian tak bisa dipahami jika tak ada aksi menyanyi, demikian pun negara tak dapat dimengerti jika tak ada

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 607.

aksi memengara. Adanya negara ialah karena dan selama manusia menegara. Andaikata itu berhenti, maka lenyap juga negara. Karena negara itu aksi atau Perbuatan manusia.¹¹⁸ Dengan kata lain, menegara sejauh dipahami sebagai tindakan bersama dari banyak manusia.

4.2.2 Realisasi Dan Kegagalan

Realisasi dan kegagalan, itu yang kita lihat dalam percakapan manusia.¹¹⁹ Unsur kegagalan itu sudah inheren (melekat) pada kodrat manusia; oleh sebab itu, melekat pada setiap perbuatan manusia. realisasi dan kegagalan itu sebetulnya tidak lain dari pada terjemahan kodrat manusia sendiri selama kita tidak berubah.¹²⁰ Demikian juga dalam menegara atau kehidupan negara. Percakapan bisa jadi percekcoakan dan pertengkaran. Demikian juga dengan kehidupan negara.¹²¹

Penegaraan itu setiap saat merupakan realisasi dan juga setiap saat mengandung kegagalan.¹²² Kita menginginkan keadilan; oleh sebab itu, menciptakan hukum-hukum. Dengan demikian, terjaminlah keadilan. Akan tetapi bukankah hukum-hukum juga kadang-kadang diputarbalikkan untuk memperkosa keadilan? Bukankah kadang-kadang ada pembela (abdi) keadilan (para hakim dan ahli hukum) yang menginjak-injak keadilan? Untuk mengatur segala sesuatu kita menciptakan berbagai macam peraturan, tetapi bukankah penyelenggaraannya

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 611.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 612.

¹²¹ Driyarkara, *Driyarkara tentang Negara dan Bangsa, Op. Cit.*, hlm. 13.

¹²² *Ibid.*

kerapkali menjadi birokrasi sehingga orang “terpaksa” melanggarnya (misalnya dengan suap, dan sebagainya).¹²³ Oleh sebab itu Driyarkara menulisnya:

Dalam percakapan bersama, kita mencari kesatuan. Akan tetapi...jika kesatuan sangat ditekankan, maka akibatnya: perpecahan! Kita menciptakan demokrasi untuk menjamin kesamaan hak, untuk menghindarkan kesamaan hak, untuk menghindarkan paksaan dari satu pihak kepada lain pihak! Akan tetapi bukankah cara-cara demokrasi kerapkali disalahgunakan untuk memaksa.¹²⁴

Dalam rangka yang dikatakan Driyarkara ini, kita diingatkan akan korupsi dalam pemilihan. Hal ini kerapkali dilakukan oleh para pemegang kekuasaan politik yang berteriak setinggi langit tentang demokrasi. Melihat dari tindakan pemimpin tentang aktivitas menegara harus ditanggapi secara kritis oleh setiap warga negara. Sebab, negara dan pemerintahan memang merupakan keharusan eksistensial manusia, tetapi itu bukanlah tujuan. Negara dan pemerintahan hanyalah sarana yang diadakan bersama. Oleh karena itu prinsip demokrasi sangatlah penting dalam aktivitas menegara. Prinsip demokrasi menuntut agar aktivitas menegara dijalankan atas dasar pengakuan manusia sebagai *person* atau pribadi. Di pihak lain, prinsip demokrasi juga menuntut warga negara menggunakan hak-hak asasi sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat bekerja sebagai satu subjek dalam kesatuan karya yang disebut aktivitas menegara. Itulah prinsip gotong royong. Dengan demikian, demokrasi menyelamatkan negara untuk tidak terjebak dalam praktik totalitarianisme, otoritarianisme dan fasisme. Menurut Driyarkara aktivitas menegara harus merupakan pelaksanaan “ada bersama dalam cinta kasih.” Prinsip ada bersama mengungkapkan sosialitas

¹²³ Driyarkara, *Sosialitas Sebagai Eksistensial*, Loc. Cit.

¹²⁴ *Ibid.*

manusia sebagai eksistensial, sedangkan prinsip cinta kasih mengimplisitkan pengakuan dan penghormatan terhadap *person*.¹²⁵

4.3 Menerangkan Istilah Menegara

Kita berbicara tentang *Negara* dan *kehidupannya*, kadang-kadang kita mengatakan juga bahwa Negara itu *kehidupan*. Supaya pengertian kita menjadi jelas, janganlah memakai istilah dulu, melainkan pandanglah *keadaan*. Yang kita lihat lebih dulu ialah manusia-manusia yang sebagai kesatuan bersama berusaha dengan tujuan untuk melaksanakan semua nilai-nilai manusia.¹²⁶ Biasanya jika orang berbicara tentang Negara, yang dimaksud ialah kesatuan: jadi, organisasi. Organisasi itu *dibedakan* dari *kehidupannya* yang berupa usaha bersama itu. Dengan demikian, orang bisa berbicara tentang Negara dan kehidupannya.

Di samping pandangan yang biasa itu kita mengajukan pandangan yang sedikit berlainan. Yang kita pandang pertama-tama ialah kehidupan tadi. Di luar kehidupan itu tidak ada organisasi; dan sebaliknya, kehidupan bersama dengan tujuan tersebut juga tidak ada di luar organisasi yang merupakan rangkanya. Oleh sebab itu, kehidupan dan rangka (organisasi) kita pandang sebagai barang *satu* yaitu perbuatan yang kita sebut *menegara* dan *menegarakan*. Kiranya sekarang jelas bahwa kita bisa berbicara tentang *menegara*.¹²⁷

¹²⁵ Silvano Keo Bhaghi, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

¹²⁶ Driyarkara, *Driyarkara Tentang Negara Dan Bangsa, Op. Cit.*, hlm. 12.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

4.4 Menegara Dan Menegarakan

Menegara dan menegarakan adalah aksi bersama. Bandingkan dengan percakapan. Di situ aksi bersama mengadakan kesatuan. Demikian juga menegara dan menegarakan.¹²⁸ Untuk lebih mengetahuinya lihatlah orang-orang yang bersama bermain tennis, bola voli dan sepak bola. Tampak di situ bahwa aksi bersama itu mengadakan kesatuan. Kesatuan itu bukanlah kesatuan yang hanya duduk, tidak melakukan apa-apa. Di sini kesatuan yang kita pandang itu tidak bisa dipisahkan dari keaksian. Kesatuan itu adalah kesatuan dalam dan karena berbuat. Kesatuan dan berbuat bukan barang dua, melainkan barang satu, ialah permainan yang sedang berjalan itu. Demikian juga dengan menegara kita menjadi kesatuan, kita: menjadi kita. Orang tidak bisa mengatakan bahwa “Akulah negara itu!” tetapi setiap warga negara dari setiap negara dapat berkata kita adalah negara itu! kita, yang menegara dan penegaraan kita, itulah negara!¹²⁹

Dasar dari keaksian bersama itu ialah kesosialan kita. Sifat sosial itu kita jalankan dengan berbagai macam cara dan bentuk. Misalnya bernyanyi bersama, dengan berpiknik, dan sebagainya, kita juga menjalankan sifat kesosialan kita. Dengan demikian, tampak bahwa tidak setiap aksi bersama harus disebut menegara! Seperti hidup bersama sebagai suami-isteri itu juga aksi bersama. Namun kehidupan itu bukan menegara.¹³⁰

¹²⁸ Driyarkara, *Sosialitas Sebagai Eksistensial*, Op. Cit., hlm. 607.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

4.5 Perbuatan Dan Nilai

Manusia hidup dalam kebersamaan, dalam kebersamaan itu manusia beraksi dan di situ ada kesatuan, dan kesatuan itu ialah untuk menjelmakan nilai. Manusia bisa beraksi bersama, misalnya untuk mewujudkan kekompakan dan keindahan dalam bermain bola kaki dan bola voli, dan juga manusia bisa mengadakan aksi bersama misalnya untuk menjelmakan nilai ekonomi. Dari kedua contoh ini menggambarkan tentang keaksian bersama yang menghasilkan nilai. Lantas muncul pertanyaan: Manakah yang hendak dijelmakan dengan menegara? Jawabannya: semua nilai-nilai manusia, sepanjang nilai-nilai itu dapat dilaksanakan dengan dan dalam kesatuan manusia. Untuk itu Driyarkara membuat batasan yakni; Menegara tidak begitu saja berarti melaksanakan nilai-nilai manusia. Nilai-nilai itu hanya dilaksanakan sepanjang kemungkinan, yang ada pada setiap kesatuan manusia. Kesatuan manusia yang berbuat bersama itu kita sebut organisasi. Demikian juga negara. Negara sebagai organisasi sudah dengan sendirinya membawa batas-batasnya.¹³¹

Negara adalah kesatuan (organisasi) kerja sama untuk melaksanakan semua nilai-nilai manusia, nilai-nilai itu juga tidak sama sekali tergantung pada kesatuan itu. Tergantung atau kurang tergantung atau tidak tergantungnya nilai-nilai itu tergantung dari sifatnya. Misalnya nilai ekonomi, itu lebih tergantung pada penegaraan; oleh sebab itu juga harus dinegarakan. Sedangkan dalam bidang ilmu kekuasaan negara adalah kurang. Ilmu tidak dapat didikte oleh negara. negara boleh dan harus mengadakan syarat-syarat supaya ilmu bisa berkembang.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 608.

Dalam hal ilmu negara tidak menelorkan dalil yang menguntungkan ideologi negara. hal semacam ini terjadi dalam negara totaliter.¹³²

Pertanyaannya, nilai apa yang diperjuangkan dalam aksi menegara? Jawaban atas pertanyaan itu kita temukan dalam gagasan Driyarkara tentang hakikat kota (*city*).

Menurut Driyarkara, fundamen atau dasar kota adalah kodrat manusia, yakni selalu terhubung dengan segala sesuatu.¹³³ Secara kodrathia, manusia dituntut untuk menjalin persatuan dengan sesama manusia dan alam jasmani. Manusia bukan hanya ‘mengaku’ tetapi juga ‘mengikat’, bukan hanya merohani tetapi juga menjasmani. Di satu pihak, manusia menyempurnakan barang-barang jasmani dengan cara memberi makna, cap atau arti terhadapnya. Di pihak lain, barang-barang jasmani itu menyempurnakan pribadi manusia. itulah hakikat kota yang sesungguhnya. Dengan demikian, hakikat pembangunan kota adalah penjelmaan atau pengorganisasian kesatuan manusia dengan sesama dan alam jasmani.¹³⁴

Pembangunan kota bertujuan untuk menyelenggarakan, mempertahankan dan menyempurnakan kehidupan organisasi-organisasi masyarakat. Kota memang dibangun oleh manusia, tetapi kota juga membangun manusia. kota berperan serta dalam menentukan eksistensi manusia untuk mencapai kemerdekaan sejati. Peran kota dijalankan dengan menciptakan kondisi-kondisi sosial seperti kedamaian,

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, hlm. 600.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 602.

kemakmuran, ketenangan dan kualitas kebudayaan yang memungkinkan manusia bisa memanusiakan dirinya. Dengan kata lain, tujuan pendirian kota adalah mengembangkan diri manusia sebagai *pesona*. Akan tetapi, setiap nilai selalu ada anti nilai. Demikian kota. Selain bernilai untuk mengembangkan kesempurnaan pribadi manusia dan persatuannya dengan sesama dan alam jasmani, kota juga mengandung resiko. Semakin besar sebuah kota, maka resikonya juga akan semakin besar. Tugas setiap masyarakat adalah mengembangkan nilai kota dan memerangi anti-nilainya.¹³⁵

4.6 Kehidupan Menegara Menurut Driyarkara Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Manusia Indonesia

Manusia menegara, manusia menegarkan diri sendiri, sesama manusia dan tanahnya dengan seluruh keadaanya. Adanya negara ialah karena dan selama manusia menegara. Untuk melihat relevansi bagi kehidupan manusia Indonesia, maka perlu berlandaskan pada pemikiran Driyarkara tentang manusia dalam Pancasila. Manusia Pancasila adalah manusia yang merupakan kesatuan dengan dunia material, dengan sesama manusia, dan akhirnya berhubungan dengan Tuhan Penciptanya. Manusia berelasi vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia dan dunia. Manusia bergerak aktif terus-menerus untuk membangun dirinya dan masyarakatnya. Dengan demikian tampaklah gambaran manusia

¹³⁵ Silvano Keo Bhaghi, *Op. Cit.*, hlm. 159.

sebagai makhluk yang melihat dirinya sendiri dan manusia sesama serta akhirnya kesatuan yang lebih sempurna dengan Tuhan.¹³⁶

Driyarkara selanjutnya menguraikan tentang Manusia Pancasila dalam kaitannya dengan sila-sila. Lima poin utama yang dimunculkan adalah Manusia Pancasila yakni:

4.6.1 Manusia Pancasila Yang Berkeadilan Sosial

Menegara berarti aktivitas atau kegiatan bersama untuk mengadakan tata-tertib bersama, kemakmuran bersama.¹³⁷ Manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan dunia. Manusia hanya bisa berkembang sebagai manusia dan mencapai kesempurnaannya dalam kesatuan dengan sesama. Oleh karena itu, manusia harus menjadi manusia yang terbuka terhadap sesama atau saling terbuka untuk hidup bersama.¹³⁸ Manusia yang hidup bersama menjalankannya dan bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia sedemikian rupa sehingga mampu menopang kehidupan bersama.¹³⁹ Maka itu manusia sebagai makhluk badani pun terikat dengan segala yang badani karena keberadaannya di dunia. Dalam menyelenggarakan kehidupannya di tengah sesama dan dalam hubungannya dengan dunia manusia menyelenggarakan keadilan sosial itu. Secara konkret manusia yang berkeadilan sosial tidak menempatkan diri sebagai kuli-kuli di hadapan instansi-instansi ataupun atasan.

¹³⁶ Driyarkara, *Menalar Dasar Negara Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 940.

¹³⁷ Mudji Sutrisno, *Driyarkara Dialog-Dialog Panjang Bersama Penulis*, (Jakarta: Obor, 2000), hlm. 20.

¹³⁸ Driyarkara, *Menalar Dasar Negara Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 941.

¹³⁹ P.J Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 89.

Atasan atau instansi juga bukan penjajah. Manusia Pancasila bersama-sama dengan sesamanya menyelenggarakan hubungan dengan alam materi dengan mengelolanya dan menggarapnya. Pembagian hasil atau gaji pun dilakukan dengan asas pemerataan dan kelayakan, tentunya dibedakan berdasarkan fungsi yang dijalankan (sebagai atasan atau bawahan). Perusahaan atau institusi yang tidak membayar pekerjaan-pekerjaannya dengan gaji yang tidak mencukupi, padahal perusahaan atau institusi berjalan dengan baik bisa dikatakan melanggar sila keadilan sosial. Selagi semangat menghisap dan mencari untung sebesar-besarnya bagi diri sendiri, maka manusia Pancasila berkeadilan sosial hanya menjadi cita-cita belaka.¹⁴⁰

4.6.2 Manusia Pancasila Yang Berdemokrasi

Manusia yang berdemokrasi adalah manusia yang melihat dirinya sendiri bersama-sama dengan sesamanya. Dalam alam kebudayaan Indonesia pandangan ini menangkap sesama sebagai anggota dari suatu keluarga.¹⁴¹ Sebagai anggota dari satu keluarga, di sini setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya.¹⁴² Dalam kaitannya kehidupan menegara, demokrasi ini merupakan dasar negara yang mengarahkan agar segala sesuatu berdasarkan hukum, dan tidak berdasarkan kekerasan. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi prinsip utama dalam mengatasi perbedaan pendapat.

¹⁴⁰ Driyarkara, *Menalar Dasar Negara Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 947.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 948.

¹⁴² P J Suwarno, *Loc. Cit.*

Manusia yang berdemokrasi harus menjunjung sifat dan sikap gotong royong. Contohnya seperti menggali selokan, membangun jembatan dan sebagainya dengan gotong royong. Yang perlu diingat bahwa dalam kesemuanya itu orang-orang mengadakan kesatuan kerja. Jadi, manusia demokrasi melihat dirinya bersama-sama dalam kesatuan kerja. Kesatuan ini di Indonesia mempunyai sifat kekeluargaan. Yang harus mempunyai sikap dan semangat ini dalam idealnya ialah tiap manusia Indonesia. Yang dimaksudkan di sini supaya semua orang melihat keseluruhan manusia sebagai kesatuan kerja. Jadi, di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap posisi, semua harus merasa dalam team kerja.¹⁴³

4.6.3 Manusia Pancasila Yang Berkebangsaan

Manusia Pancasila yang berkebangsaan harus mampu mengetahui bahwa kebangsaan adalah adanya suatu bangsa sebagai bangsa. Dengan mengikrarkan suatu kebangsaan orang mengakui identitas dari bangsa itu. artinya, orang mengakui bahwa sejumlah manusia merupakan suatu kesatuan sosiologis, kebudayaan, ekonomi, sejarah, dan cita-cita. Jika manusia mengakui suatu bangsa sebagai bangsanya, maka dia mengakui bahwa dia adalah putra dari bangsa itu. Dia mengatakan: inilah kebangsaanku, artinya; saya termasuk dalam adanya sebagai bangsa. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa orang meniadakan bermacam-macam ciri yang khas dari sukunya. Di seluruh dunia tidak ada sesuatu bangsa yang homogen, artinya yang di dalamnya tidak memuat aneka ragam golongan

¹⁴³ Driyarkara, *Menalar Dasar Negara Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 950-951.

atau suku. Jika kita mengingat sifat bhineka-tunggal dari negara kita, maka adanya aneka ragam itu sudah mestinya.¹⁴⁴

Manusia Pancasila yang berkebangsaan mampu melihat dirinya sebagai suatu anggota dari keseluruhan yang berupa bangsanya itu (keseluruhan yang mencakup kesatuan wilayah dan bangsa). Manusia menjadi manusia dalam di dalam bangsa. Manusia tidak terpisahkan dari konteks hidupnya dan dengan cinta yang membangun sungguh-sungguh ikut serta dalam semua penyelenggaraan kebaikan dan perbaikan negara dalam semua lapangan yang mungkin untuk yang bersangkutan. Sikap curang, malas kerja, berkorupsi bukanlah sikap yang menunjukkan seseorang yang dijiwai oleh semangat kebangsaan.¹⁴⁵ Oleh karena itu perikemanusiaan harus juga dilakukan dalam hubunganku dengan kesatuan yang ditimbulkan oleh sejarah bersama, karena kesatuan seperti itu telah membentuk diriku sebagai manusia konkret.¹⁴⁶

4.6.4 Manusia Pancasila Yang Berperikemanusiaan

Manusia yang mengikrarkan perikemanusiaan adalah manusia yang melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang dengan rasio dan kemerdekaannya harus menyempurnakan dirinya, bersama-sama dengan sesama manusia dalam masyarakat. Driyarkara melihat bahwa dalam manusia Pancasila yang berperikemanusiaan ini, manusia harus dijunjung tinggi, *di-pantas-kan* sesuai dengan martabatnya. Itulah sebabnya pemeluk perikemanusiaan tidak suka

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm 952-953.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 954-955.

¹⁴⁶ P. J Suwarno, *Loc. Cit.*

melihat sesamanya menderita, kelaparan, dalam keadaan yang menyedihkan dan sebagainya. Maka, manusia turun tangan untuk menolong. Inilah arti sehari-hari dari kata perikemanusiaan.¹⁴⁷ Melihat dari pandangan ini, maka pemeluk perikemanusiaan membangun dirinya dengan membangun kebudayaan. Dirinya sendiri pun dibudayakan. Para pemeluk perikemanusiaan dalam bertutur kata dan bertindak sesuai dengan martabat manusia.

Pemeluk perikemanusiaan melihat dirinya sendiri dalam kesatuan dengan sesama dalam masyarakat. Jadi, semua usaha setiap manusia merupakan usaha bersama. Dalam hidup bersama, dalam pergaulan, dalam memperlakukan sesamanya, para pemeluk perikemanusiaan tentulah *human*, artinya sepantas manusia. Manusia yang perikemanusiaan menolak *rasialisme*. Karena bagi para pemeluk perikemanusiaan melihat sesama manusia adalah saudaranya. Manusia yang berperikemanusiaan memandang negara dan pemerintahan adalah sarana (*means*) yang diadakan bersama.¹⁴⁸ Driyarkara kemudian menerangkan bahwa sikap berperikemanusiaan itu harus dilandasi oleh Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.¹⁴⁹ Aku harus mengakui bahwa adaku bersumber dari ada yang mutlak. Ada yang mutlak itu adalah pribadi yang maha sempurna. Ketuhanan adalah dasar dari semua perbuatanku, dasar dari pelaksanaan perikemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi dan kesatuan bangsa.¹⁵⁰ Karena adanya manusia adalah sebagai akibat adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal

¹⁴⁷ Driyarkara, *Menalar Dasar Negara Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 958.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 959.

¹⁵⁰ P. J Suwarno, *Op. Cit.*, hlm. 92.

mula segala sesuatu, adanya Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertip alam.¹⁵¹

¹⁵¹ H. Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 74.